

FLYPAPER EFFECT PADA DAU DAK DAN PAD TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dona Asriati

dona_asriati04@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide empirical evidence to the influence of general allocation fund, special allocation fund, and local own source revenue to the local government expenditure of districts/cities in East Java province and to provide empirical evidence to the tendency of the occurrence of flypaper effect on the influence of the general allocation fund to the local expenditure is greater than the influence of local own source revenue to the local government expenditure of districts/cities in Indonesia. This research has been done by using quantitative research and causality method. The population is all districts and cities in East Java Province i.e. 38 areas with the observation periods from 2011 to 2015 and the sample collection technique has been conducted by using purposive sampling. The data analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions. Based on the result of the hypothesis test it can be concluded that: 1) local own source revenue (PAD) gives positive influence to the local expenditure. 2) General allocation fund (DAU) gives positive and significant influence to the local expenditure. 3) Special allocation fund (DAK) gives significant and positive influence to the local expenditure. 4) The coefficient value of the General Allocation Fund is greater than coefficient value of Local Own Source Revenue, it shows that the flypaper effect has occurred in local expenditure of cities/districts in East Java Province.

Keywords: PAD, DAU, DAK, local expenditure, flypaper effect.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris pada pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta memberikan bukti empiris kecenderungan terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 daerah dengan rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 4) Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD, hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Jawa Timur,

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, belanja daerah, flypaper effect

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari desentralisasi yang selaras dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2012). Pemberian Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sehingga daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan maju dibidang industri serta perdagangan cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kesenjangan dikarenakan adanya daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Kecenderungan ini membuat banyak terjadi ketimpangan antara setiap daerah di Indonesia. Pendapatan asli daerah yang sesungguhnya menjadi wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaannya terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Halim, 2012).

Di saat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menyebabkan PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* atau dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja pembangunan (Halim, 2012).

Beberapa kajian mengenai pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain: Suyanto (2010); Afrizawati (2012); Aprilla dan Saputra (2013); Adiputra (2014), Santoso, *et al.*, (2016). Para peneliti tersebut menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap BD dengan mengambil sampel kabupaten / kota di Jawa Tengah, DIY, Bali dan pulau Sumatera. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak semua PAD memiliki pengaruh terhadap BD dan tidak semua DAU mengalami *flypaper effect*. Menurut Aprilla dan Saputra (2013) yang disebut *flypaper effect* adalah suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah dana transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan sendiri.

Di saat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menyebabkan PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* atau dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat. Fenomena *flypaper effect* pada kinerja keuangan pemda kab/kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemda terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemda secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai kewenangannya. Namun penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.

Dari uraian tersebut diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sebenarnya DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dan apakah terjadi *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Dua hal yang dapat terjadi pada penelitian ini adalah terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Jika penelitian ini mengindikasikan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan untuk meninjau ulang kebijakan yang telah diterapkan agar dapat mengeksplor secara maksimal pendapatan yang bersumber dari daerah sebagai bentuk kemandirian dari daerah tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?, 2) Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?, 3) Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah rendah atau daerah dengan Pendapatan Asli Daerah tinggi?, sedang tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk memberikan bukti empiris pada pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2) Untuk memberikan bukti empiris kecenderungan terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, 3) Untuk memberikan bukti empiris tentang perbedaan *flypaper effect* antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang Pendapatan Asli Daerah rendah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Pendapatan Asli Daerah tinggi.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan *agent* sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak *principal* merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak *agent* bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak *principal* (Purwanti, 2013). Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemda) menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda).

Dalam hubungan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai *agent* dan publik bertindak sebagai *principal*. Menurut Hagen (2005) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai *agent* dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menepatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran. Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman pada Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Anthony dan Govindarajan (2010) konsep teori *agency* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Asumsi teori *agency* terjadi di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan harapan *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Otonomi Daerah

Otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. *Auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Bastian (2006:338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat (Halim, 2012).

Flypaper effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada pendapatan asli daerahnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah. Istilah *Flypaper Effect* muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut yang kemudian dalam banyak literatur disebut dengan *Flypaper Effect*. Sedangkan istilah *Flypaper* adalah "*money sticks where it hits*". Sejauh ini, belum ada padanan kata "*Flypaper Effect*" dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan (Kurnia, 2013). ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer disbanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya sendiri maka disebut dengan *Flypaper Effect*.

Asumsi penentuan terjadinya *Flypaper effect* pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah menyatakan bahwa *Flypaper effect* terjadi apabila: 1) Pengaruh atau nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan, 2) Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper effect*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2013:132) pendapatan asli daerah merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dipergunakan untuk menutupi segala pengeluaran daerah. Halim (2012:94) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan belanja daerah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja terdiri atas: 1) Belanja administrasi umum (belanja tidak langsung) adalah belanja yang secara tidak langsung dipengaruhi program atau kegiatan, 2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan, 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset, 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan, 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana, seperti terjadinya bencana alam.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besarnamun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh aloksi dana umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten dan kota.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilaokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria dalam pengalokasian DAK, yaitu: 1) Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, 2) Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan Perundang- Undangan dan karakteristik daerah, 3) Kriteria teknis, ditetapkan dengan memperhatikan perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat ini dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan umum yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Pemerintah daerah pun harus sebaik mungkin mengelola dana tersebut demi pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan pemanfaatan DAU yang optimal dan dengan sesuai sasaran, itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Situngkir (2009:68) dimana dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pemerintah Pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri sebagai peneriman daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri. Memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai pengeluaran pemerintah

daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang nantinya akan menambah pendapatan asli daerah. Dengan begitu peningkatan investasi modal diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007:12), Afrizawati (2012); maupun penelitian Santoso, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dengan begitu pengeluaran pemerintah lewat belanja modal melalui pembangunan di berbagai sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: DAU dan PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Flypaper Effect

Pelaksanaan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagian daerah dari dana bagi hasil. Dalam penggunaannya semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah, tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006) dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian yang dilakukan Maemunah menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, baik tanpa lag maupun dengan lag. Ketika diregres secara serempak baik dengan maupun tanpa lag, pengaruh DAU terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera (Maimunah, 2006).

Prakosa (2010) menyatakan juga bahwa pengujian dengan menggunakan *lag* juga membuktikan terjadinya *flypaper effect*, yakni signifikansi pengaruh DAU yang lebih tinggi daripada PAD. Artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD tidak dapat ditolak. Kusumadewi dan Rahman (2010) mengatakan bahwa *P value* t hitung yang diperoleh masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Namun jika dibandingkan, ternyata *P value* t hitung variabel DAU jauh lebih kecil daripada *P value* t hitung variabel PAD, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Pengujian dengan menggunakan *lag* menghasilkan nilai *P value* untuk DAUt-1 lebih kecil daripada *P value* untuk PADt-1. Penelitian Afrizawati (2012) membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Sedangkan hasil penelitian Santoso, *et al* (2016) DAU secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung. Fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan kab/kota yang memiliki derajat otonomi fiskal (DOF) rendah atau tinggi. Berdasarkan penelitian penelitian yang ada, maka hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya *flypaper effect* adalah:

H₂: Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Tinggi dan Pendapatan Asli Daerah Rendah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari potensi ekonomi suatu daerah baik berupa sumber daya alam atau pun industri tidaklah sama. Sehingga terjadi perbedaan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara setiap daerah di Indonesia. Yang

menyebabkan adanya daerah yang kaya PAD dan daerah yang miskin PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006) diketahui bahwa tidak terdapat perbedaannya terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah (yang diukur melalui rasio DOF masing-masing daerah) di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Ini berarti *flypaper effect* yang terjadi pada daerah kaya PAD tidak berbeda dengan *flypaper effect* yang terjadi pada daerah miskin PAD. Atau dengan kata lain, *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah miskin PAD, namun juga daerah kaya PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, *et al* (2016) menyimpulkan terjadi *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan daerah yang memiliki PAD tinggi dengan daerah yang memiliki PAD rendah. Pendapat tersebut tidak sejalan dengan Darmayasa dan Sedanayasa (2012) yang menyimpulkan tidak terjadi *flypaper effect* pada DAU dan PAD terhadap Belanja Modal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007); Afrizawati (2012) maupun Suyanto (2010) diperoleh *P value* untuk masing-masing variabel pada dua kondisi daerah yang semua variabel penelitian signifikan (lebih kecil dari α). Namun *P value* untuk variabel DAU jauh lebih kecil daripada variabel PAD baik pada daerah dengan PAD tinggi maupun pada daerah dengan PAD rendah. Ini berarti bahwa baik pada daerah kaya PAD maupun pada daerah miskin PAD, keduanya mengalami *flypaper effect*, dimana DAU yang diterima daerah lebih mampu melakukan kegiatan pengeluaran daerah untuk melakukan belanja dibanding PADnya sendiri. Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kausalitas (*causal research*), yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:74), yang mempunyai sifat pengujian hipotesis mengenai adanya *flypaper effect* yang terjadi dalam transfer dana DAU dan PAD terhadap Belanja daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:72) dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 daerah dengan rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:73) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel diambil secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota tersedia di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur dari tahun 2011-2015, 2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota dari tahun 2011-2015 tidak terdapat permasalahan

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, terdapat 3 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang Laporan Realisasi Anggaran terindikasi bermasalah berdasarkan hasil audit BPK RI. 3 (Tiga) Kab/Kota yang Laporan Realisasi Anggaran bermasalah adalah Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep dan Kota Madiun, sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 - 2015 yang diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Timur.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini adalah angka realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 hingga 2015 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Penghitungan PAD berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yaitu:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian ini adalah angka realisasi DAU Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 hingga 2015 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Penghitungan DAU berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah Fiskal = Bobot Celah Fiskal + DAU seluruh kab/kota.

DAU seluruh kab/kota = $90\% \times (26\% \times \text{Pendapatan Dalam Negeri Netto})$

Bobot celah fiskal daerah = $\frac{\text{Celah fiskal daerah}}{\text{Total celah fiskal seluruh kab/kota}}$

Celah fiskal daerah = kebutuhan keuangan - kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Khusus, menurut Halim (2012) Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Disamping itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Alokasi Khusus dihitung dengan menggunakan rumus : $DAK = PU \text{ APBD} - BPD$

Belanja Daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 12 tahun 2008). Belanja daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2011 hingga 2015 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Penghitungan Belanja Daerah menurut Aprilla dan Saputra, (2013) sebagai berikut:

Belanja Daerah = Belanja Operasional + Belanja Modal

Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD (Aprilla dan Saputra, 2013). Dalam penelitian ini *flypaper effect* di ukur dengan cara melihat besaran pengaruh yang terjadi pada pertumbuhan DAU dan pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan Belanja Daerah. Untuk mendapatkan data pertumbuhan PAD, DAU dan Belanja Daerah digunakan rumus pertumbuhan (Aprilla dan Saputra, 2013):

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{(X_t) - (X_{t-1})}{(X_{t-1})}$$

Teknik Analisis Data

Model Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh PAD, DAK dan DAU terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa belanja daerah. Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Data diolah dengan menggunakan alat bantu berupa SPSS 20. Model yang digunakan adalah:

$$\text{Persamaan Hipotesis 1: } BD_t = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 PAD + e \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Persamaan Hipotesis 2: } BD_t = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_3 PAD + e \dots \dots \dots (2)$$

Uji Goodness of Fit

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:83).

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi model yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2006:64). Kriteria pengujian: 1) Jika $\text{Sig} > (\alpha) 0,05$, maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya; 2) Jika $\text{Sig} < (\alpha) 0,05$, maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Teknik pengujian menggunakan uji t. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas adalah jika $P \text{ value } f \text{ hitung} < (= 0,05)$ maka H_0 ditolak. Dimana mempunyai makna bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap (Belanja Daerah) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap (Belanja Daerah). Pengujian hipotesis kedua juga menggunakan uji t seperti pada pengujian hipotesis pertama. Hanya saja PAD dan DAU yang digunakan adalah PAD dan DAU periode satu tahun sebelumnya, kemudian diregresikan dengan Belanja Daerah tahun berjalan.

Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika $P \text{ value } t \text{ hitung} < (= 0,05)$ maka H_0 ditolak. Untuk mengetahui adanya *flypaper effect* maka $P \text{ value } t \text{ hitung}$ DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) dari pada $P \text{ value } t \text{ hitung}$ PAD, atau $P \text{ value } t \text{ hitung}$ PAD tidak signifikan. Begitu pula dengan pengujian hipotesa ketiga, hanya saja variabel independen yang digunakan yaitu PAD dan DAU pada periode 1 tahun sebelumnya.

Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Dengan mengelompokkan menjadi 2 yaitu: 1) 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil,

2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) tinggi dan Dana Alokasi Umum (DAU) kecil.

Pengklasifikasian ini berdasarkan nilai prosentase dari DOF (Derajat Otonomi Fiskal) setiap daerah. Daerah dengan PAD dibawah rata-rata dikelompokkan dalam daerah dengan PAD rendah sedangkan daerah dengan PAD diatas rata-rata dikelompokkan pada daerah dengan PAD tinggi. Sedangkan Daerah dengan DAU dibawah rata-rata dikelompokkan dalam daerah dengan DAU rendah sedangkan daerah dengan DAU diatas rata-rata dikelompokkan pada daerah dengan DAU tinggi. Perhitungan rasio DOF menggunakan formula (Aprilla dan Saputra, 2013):

$$\text{DOF PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$\text{DOF DAU} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Analisis statistik ini menggunakan uji *Paired Sample t-test* atau uji T (uji beda). Pengolahan data dalam uji hipotesis ini menggunakan program SPSS 20 dengan menggunakan *significance level* 0,05. Penentuan apakah *flypaper effect* terjadi atau tidak terjadi dengan kriteria: 1) Terjadi *flypaper effect* jika $P_{\text{value}} \text{ hitung DAU} < P_{\text{value}} \text{ hitung PAD}$, 2) Tidak terjadi *flypaper effect* jika $P_{\text{value}} \text{ hitung DAU} > P_{\text{value}} \text{ hitung PAD}$

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah (BD) independen serta Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Hasil analisis deskriptif variabel disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	175	3024186430.14	40356494783.97	2741751301.93	4958975848.98
DAU	175	8322668200.00	16131617770.00	8027820517.74	2830881888.80
DAK	175	712569000.00	2045765700.00	653102340.14	324623736.07
BD	175	40966491121.90	64903597595.00	15570992169.30	8547674651.69

Sumber: data sekunder, diolah

Pada Tabel 1 terlihat bahwa PAD mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 3024186430.14,- PAD memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 40356494783.97,- Nilai *mean* Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 274.175.130.112.93,- Standar deviasi sebesar Rp. 495.897.584.877.98,- Nilai standar deviasi lebih besar jika dibandingkan nilai mean-nya sebesar Rp 274.175.130.112.93,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada Pendapatan Asli Daerah relatif kurang baik.

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 8322668200.00,- Nilai maksimum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 16131617770.00,- Nilai Standar deviasi sebesar Rp. 283.088.188.871,80,- masih lebih kecil jika dibandingkan nilai mean-nya sebesar Rp 802.782.051.702,74,- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada Dana Alokasi Umum (DAU) dikatakan baik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 7.125.690.000,00,- Nilai maksimum Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 204.576.570.000,00,- Standar deviasi sebesar Rp. 32.462.373.600.07,- masih lebih kecil jika dibandingkan nilai mean-nya

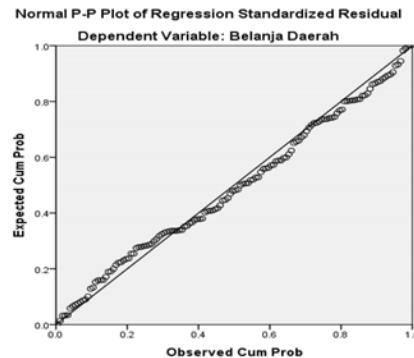
sebesar Rp 65.310.234.026.14,- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dikatakan baik.

Belanja Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 409. 664 911.211.90,- Nilai maksimum Belanja Modal sebesar Rp. 6.490.359.759.532.00,- Standar deviasi sebesar Rp. 85.4767.465.142.69,- masih lebih kecil jika dibandingkan nilai mean-nya sebesar Rp 1.557.099.216.979.30,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data pada Belanja Daerah baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Grafik Normal P-P Plot disajikan dalam gambar dibawah ini.



Sumber: data sekunder, diolah

Gambar 2
Grafik P-Plots

Pada grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.745	1.343
	DAU	.531	1.883
	DAK	.597	1.675

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasar Tabel 2 di dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian ini.

Uji Autokolerasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin - Watson (D-W).

Tabel 3
Hasil Perhitungan Auto-Korelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,371 ^a

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

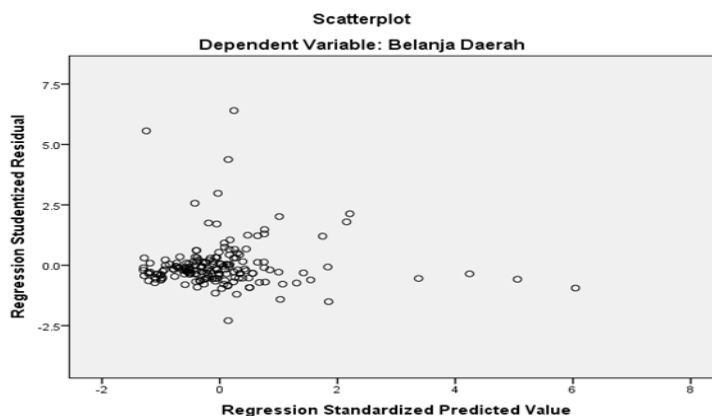
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil perhitungan autokorelasi, diperoleh nilai *Durbin Watson* adalah sebesar 1,371. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independennya.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut.



Sumber: data sekunder, diolah

Gambar 2
Grafik Scatterplot

Dari grafik *scatterplot* pada gambar 2 terlihat bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak. Titik-titik juga terdapat baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Untuk menguji tidak terjadinya Heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji rank spearman. Aturan yang digunakan adalah jika signifikan ($\text{sig.} < 0,05$) berarti ada Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika tidak signifikan ($\text{sig.} > 0,05$) berarti tidak ada gejala Heteroskedastisitas. Tabel berikut menyajikan hasil ringkasan pengujian Heteroskedastisitas dari model regresi yang digunakan

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai sig	Kondisi	Keterangan
X ₁ -Abs Residu X ₁	0,320	Sig > 0,05	Bebas Heteroskedastisitas
X ₂ -Abs Residu X ₂	0,181	Sig > 0,05	Bebas Heteroskedastisitas
X ₃ -Abs Residu X ₃	0,159	Sig > 0,05	Bebas Heteroskedastisitas
X ₄ -Abs Residu X ₄	0,199	Sig > 0,05	Bebas Heteroskedastisitas
X ₅ -Abs Residu X ₅	0,293	Sig > 0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil heteroskedastisitas pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa regresi untuk semua variabel bebas terhadap hasil residunya masing-masing memiliki tingkat signifikansi koefisien korelasi Rank Spearman yang lebih besar dari 0,05, sehingga persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi koefisien regresi disajikan pada Tabel 5 dibawah ini (sumber output SPSS):

Tabel 5
Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	46550811563.28	39553022329.33			1.177	.241
1 PAD	1.267	.030	.735		42.074	.000
DAU	1.258	.062	.417		20.139	.000
DAK	2.348	.514	.089		4.569	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Sumber: data sekunder, diolah

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$BD = 46550811563.28 + 1,267PAD + 1,258DAK + 2,348DAU$$

Uji Goodness of Fit

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Nilai R-Square untuk Hipotesis 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.961	.960	169979323530.69788

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber: data sekunder, diolah

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R²* sebesar 0,961 hal ini berarti 96,1% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sisanya (100% - 96,1% = 3,9 %) dijelaskan sebab yang lain diluar model.

Tabel 7
Nilai R-Square untuk Hipotesis 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.400	.392	.095629350

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Sumber: data sekunder, diolah

Tampilan output SPSS pada Tabel 7 menunjukkan besarnya *adjusted R²* sebesar 0,400, hal ini berarti 40,0% variasi (Belanja Daerah) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sisanya (100% - 40,0% = 60,0%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Dengan kata lain variasi variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independennya.

Uji Statistik F

Pada Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dilihat hasil dari Uji F yang dilakukan.

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F Hipotesis 1

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1221884730439842.00	3	407294910146614.00	1409.66	.000 ^b
	Residual	49406979431800.00	171	288929704279536.00		
	Total	1271291709871642.00	174			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber: data sekunder, diolah

Dari uji ANOVA atau F test menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 1409.66 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga simpulannya model yang digunakan dalam penelitian layak.

Tabel 9
Hasil Uji Statistik F Hipotesis 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.836	2	.418	45.727	.000 ^b
	Residual	1.253	137	.009		
	Total	2.089	139			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasar Tabel 9 hasil perhitungan Uji statistik F untuk persamaan hipotesis 2, diperoleh nilai F hitung sebesar 45,727 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah (BD) atau dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD).

Pengujian Hipotesis

Pengujian Model 1: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Hipotesis 1)

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dirangkum dalam Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10
Hasil Perhitungan Uji t

Variabel	t _{hitung}	Sig	(α)	Keterangan
PAD	42.074	.000	0,05	Berpengaruh Positif
DAU	20.139	.000	0,05	Berpengaruh Positif
DAK	4.569	.000	0,05	Berpengaruh Positif

Sumber: Output SPSS

Berdasar Tabel 10 hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tabel 10 secara parsial diperoleh signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah terbukti. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Pelealu (2013) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Manado serta penelitian Sari dan Indrajaya (2014) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tabel 10 secara parsial diperoleh signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah terbukti. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Pelealu (2013) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Manado serta penelitian Sari dan Indrajaya (2014) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tabel 10 secara parsial diperoleh signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah terbukti. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Pelealu (2013) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Manado serta penelitian Sari dan Indrajaya (2014) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Pengujian Model 2: Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Hipotesis 2)

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dirangkum dalam Tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11
Hasil Perhitungan Uji t
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel	Coefficients	t	Sig
Constanta	0,060		.000
DAU	0,474	7,688	.000
PAD	0,951	3,310	.001

R-Square = 0,400
Sig-F = 0,000

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan Tabel 11 di atas, apabila diperlihatkan dalam model persamaan statistik diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = 0,060 + 0,474 \text{ DAU} + 0,951 \text{ PAD} + e$$

Persamaan regresi 2 (Tabel 11) digunakan untuk menjawab **Hipotesis 2**. Hipotesis kedua menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. Dari Tabel 13 ditampilkan tingkat signifikansi probabilitas DAU sebesar 0,000 dan tingkat signifikansi probabilitas PAD sebesar 0,001. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Belanja Daerah), dengan demikian **Hipotesis 2** terdukung.

Untuk mengetahui adanya *flypaper effect* maka $P_{value} t_{hitung} \text{ DAU} > P_{value} t_{hitung} \text{ PAD}$, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui nilai $t_{hitung} \text{ DAU}$ sebesar 7,688 dengan sig 0,000 > nilai $t_{hitung} \text{ PAD}$ sebesar 3,310 dengan sig 0,001, sehingga dinyatakan terjadi *flypaper effect*. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Santoso, *et al.*, (2015) yang menyimpulkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung, serta didukung oleh penelitian Darmayasa dan Sedanayasa (2012) dengan hasil yang konsisten.

Dikarenakan tingkat signifikansi probabilitas (*Pvalue*) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,000 < tingkat signifikansi probabilitas (*Pvalue*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dikarenakan mayoritas sumber Pendapatan Daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil bila dibandingkan Dana Alokasi Umum (DAU). Hasil penelitian mendukung penelitian Afrizawati (2012) yang menyimpulkan terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Sedang diperkuat dengan hasil penelitian Suyanto (2011) yang menyimpulkan kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya

Pengujian Uji Beda: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah atau daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi (Hipotesis 3)

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dirangkum dalam Tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12
Hasil Pengujian Uji Beda

Variabel	t_{hitung}	sig	Keterangan
PAD Tinggi - PAD Rendah	1.712	.148	Tidak signifikan
DAU Tinggi - DAU Rendah	7.167	.000	Signifikan

Sumber: data sekunder, diolah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*. Hasil pengujian pada daerah dengan PAD rendah menunjukkan nilai signifikan DAU sebesar 0.000 dan PAD sebesar 0.148 hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah dibandingkan PAD. Ini menggambarkan terjadi fenomena *flypaper effect* pada daerah dengan PAD rendah, hal ini berarti bahwa kedua rata-rata terjadi *flypaper effect* pada daerah dengan PAD rendah dan daerah dengan PAD tinggi tidak berbeda. Dengan hasil DAU yang lebih signifikan di bandingkan PAD sehingga terjadi *flypaper effect* pada daerah dengan PAD tinggi. Karena daerah dengan PAD rendah terjadi *flypaper effect* dan daerah dengan PAD tinggi terjadi *flypaper effect* sehingga hipotesis ketiga diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam hal ini masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam rangka membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional telah digunakan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur melalui peningkatan Belanja Daerah. Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD, hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga selama tahun 2011-2015 terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Saran

Bagi pemerintah kab/kota di Provinsi Jawa Timur, hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadinya *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pembiayaan dalam APBD lebih bergantung pada penerimaan dana-dana transfer (khususnya DAU), maka untuk mengurangi ketergantungan tersebut pemda disarankan melakukan upaya memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah melalui: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak daerah dengan tetap mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, (2) melakukan investasi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor usaha yang prospektif.; dan(3) optimalisasi eksplorasi sumber daya alam untuk meningkatkan potensi dana bagi hasil (DBH).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, maka disarankan kepada pemerintah pusat agar ; (1) menerapkan kebijakan pemberian bantuan yang diarahkan pada kebutuhan daerah setempat, (2) mengurangi tingkat

ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui kebijakan ; (a) memberikan insentif kepada daerah yang mampu menaikkan dan menjaga konsistensi peningkatan kapasitas fiskalnya, sebagai kompensasi pengganti atas berkurangnya celah fiskal, (b) menambah jenis pajak yang dapat dilimpahkan kewenangan pemungutannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, (c) mempertimbangkan kembali sistem bagi hasil dari penerimaan pajak kepada pemda, (d) mereformasi pajak-pajak daerah dengan meniadakan pajak pajak daerah yang tidak produktif., sehingga dapat menekan biaya pemungutan dan perhatian dapat difokuskan pada jenis pajak yang lebih produktif.

Bagi penelitian selanjutnya: a) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas rentang waktu penelitian dan menggunakan data tahun terbaru, b) Peneliti juga diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian antara satu provinsi dengan provinsi lainnya untuk melihat apakah fenomena flypaper effect juga terjadi di daerah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, M. 2014. Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah /Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Periode 2008-2013). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Anthony dan Govindarajan. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit UPP-AMP. Yogyakarta.
- Afrizawati, 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Vol.2(1): 1-20.
- Aprilla, N dan R. A. Saputra. 2013. Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol 3(2): 107-132.
- Darmayasa dan Sedanayasa. 2012. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3(2) ISSN: 2337-3806
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 8(1): 1-19.
- Ferdinand, M. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hagen, V. 2005. *Political Economy of Fiscal Institutions*. Discussion Paper 149. Governance and efficiency of Economic System. GESY.
- Kurnia, S. 2013. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Modernisasi*. Vol. 9(2): 140-160.
- Kusumadewi, D. A dan A. Rahman, 2010. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, Vol. 11(1): 121-135.
- Maimunah, M.. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Prakosa, K. B. 2010. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 8(2): 104-117.

- Purnamawati, E. S. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Santoso, I., I. W. Suparta dan Saimul. 2016. Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. Vol (4):2: 135-166
- Situngkir, A. 2009. Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, Dan Dana Khusus pada Belanja Modal Di Kota Dan Kabupaten Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*. Vol. 4(2): 93-103 ISSN 1907-1442.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Keduapuluh. Alfabeta. Bandung.
- Suyanto. 2010. *Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal* *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 11(1): .69-92
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____ Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____ No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.